



**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan**

PERUBAHAN RENJA

2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rohmat dan hidayahNya Perubahan Perubahan Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA-OPD) Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya Perubahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA-OPD) ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Lamongan, atas pengarahan dan pembinaannya .
2. Yth. Seluruh jajaran staf Bakesbangpol, atas masukan dan kerjasamanya yang baik selama ini.

Selanjutnya kami berharap, agar Perubahan Perubahan Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA-OPD) ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Kami sadar bahwa Perubahan Perubahan Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA-OPD) ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan saran yang sifatnya membangun. Demikian Perubahan Perubahan Rencana Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENJA-OPD) ini kami buat, semoga ada guna dan manfaatnya.

Lamongan, Juni 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760410 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	6
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat	24
BAB III.....	26
TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Error! Bookmark not defined.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan Dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah	26
3.3 Program Dan Kegiatan	29
BAB IV	41
PENUTUP	41
5.1 Catatan Penting	41
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	42
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Perubahan RENJA Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Perubahan RENJA mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RENJA Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan operasional dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
11. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13-17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2021-2026.
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Lamongan.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 adalah untuk menguraikan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuannya adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memberi arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis mengenai kebijakan selama lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun. Dengan demikian maka Perubahan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi landasan bagi penyusunan RPJMD, berfungsi sebagai penjabaran yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini yang diharapkan, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan;
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan RENJA PD S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah;
- 3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan tahun 2025 s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan 2025 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program Kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Adapun pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tidak Ada (Nihil)

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini melalui kegiatan Koordinasi dengan anggota FKDM terkait kewaspadaan di wilayah Kabupaten Lamongan, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini dan peningkatan fasilitasi konflik sosial melalui kegiatan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menambah personil Tim monitoring yang bekerjasama dengan Polres dan Kodim, Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi RANHAM, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Monitoring Wilayah terkait Ipoleksosbud dan pemantauan orang

asing di wilayah Kabupaten Lamongan, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi oleh FORKOPIMDA terhadap isu-isu terkini yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 capaian realisasi renstra tercapai 100%.

- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Survei Keberadaan Ormas Baru, Pendataan dan Verifikasi Proposal Bantuan Ormas, Orpem dan LSM, Pembinaan, serta penyaluran dana Hibah Ormas/Orpem/Lsm. Sampai dengan triwulan I Tahun 2025 capaian realisasi renstra tercapai 100%. Dimana kegiatan terdiri dari monitoring ormas, pembinaan ormas, dan penyaluran dana hibah ormas.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dilakukan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan capaian realisasi renstra sampai pada triwulan I Tahun 2025 sudah melebihi target yang ditentukan dimana target renstra pada tahun terakhir sebanyak 3000 orang dan sudah tercapai 4193 atau capaian realisasi sebesar 139,76%.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. capaian realisasi renstra sampai pada triwulan I Tahun 2025 sudah melebihi target yang ditentukan dimana target renstra pada tahun terakhir sebanyak 800 orang dan sudah tercapai 1380 atau capaian realisasi sebesar 212,18%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang melebihi dari target yang ditentukan, penyebab dapat terlaksana demikian sebagai berikut:

- a. Berkolaborasi dengan lembaga eksternal dengan menjadi narasumber sosialisasi;
- b. Adanya program kegiatan prioritas pada tahun 2023 yaitu sosialisasi pada berbagai kecamatan dengan bekerjasama dengan anggota DPRD sebagai narasumbernya (SOSIS);
- c. Adanya inovasi PODCAST BANGPOL dalam memperluas jangkauan masyarakat yang dapat disosialisasi.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Dampak realisasi kegiatan yang sudah melebihi target yaitu dengan menaikkan target pada setiap tahunnya sehingga kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dinilai selalu mengalami peningkatan secara simultan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

Adapun strategi Bakesbangpol dalam mengkadapi kebijakan pada semua kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Kegiatan dalam bentuk pelayanan, konsultasi dan fasilitasi dilakukan dengan:
 - 1) Memaksimalkan kegiatan melalui daring (online);
 - 2) Menyusun SOP Baru terkait pelayanan secara online;
 - 3) Mempublikasikan persyaratan di web;
 - 4) Meningkatkan pengetahuan/kapasitas SDM pegawai di bidang IT
- b. Kegiatan dalam bentuk Pembinaan, Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan Monitoring (pertemuan/lapangan) dilakukan dengan:
 - 1) Memanfaatkan media sosial yang ada (memanfaatkan PODCAST BANGPOL, aplikasi zoom atau media rapat secara online sebagainya);
 - 2) Menyusun SOP;

- 3) Memaksimalkan Posko Koordinasi dan Monitoring melalui Pusat Komunikasi Informasi (PUSKOMIN) Tim Kewaspadaan Dini (TKD) Daerah.
- 4) Terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yakni Muspida, Polres, Kodim, Satuan Pol PP utamanya pada kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dari dan OPD yang membidangi atau yang dapat mengantisipasi wilayah yang terjadi kerusuhan atau rawan konflik.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai IKM Internal BadanKesatuan Bangsa dan Politik	84,19	3.403.477.458	84,19	3.403.477.458	84,30	3.720.673.687,96	-	822.237.337	0,00%	22,10%	84	4.225.714.795	100,00%	124,16%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	
	8.01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi tepat waktu	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	30.000.000,00	21,50%	6.450.000	21,50%	21,50%	122%	49.450.000	121,50%	115,00%		
	8.01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	13.035.000,00	1 Dokumen	6.450.000	50%	49,48%	2 Dokumen	21.450.000	100,00%	143,00%		
	8.01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	5.563.600,00	-	-	0,00%	0,00%	2 Laporan	-	0,00%	0,00%		
	8.01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	11.401.400,00	-	-	0%	0,00%	4 Laporan	20.000.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	100%	2.731.673.307	100%	2.731.673.307	100%	3.181.782.237,96	22,29%	709.346.282	22,29%	22,29%	122%	3.441.019.589	122,29%	125,97%		
	8.01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	20Orang	2.711.734.647	20Orang	2.711.734.647	19Orang/Bulan	3.156.782.237,96	19Orang	704.963.182	100%	22,33%	39 Orang	3.416.697.829	100,00%	126,00%		
	8.01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan	9.999.860	1 Laporan	9.999.860	1 Laporan	12.500.000,00	-	-	0%	0,00%	1 laporan	9.999.860	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	14 Laporan	9.938.800	14 Laporan	9.938.800	14 Laporan	12.500.000,00	4 Laporan	4.383.100	28,57%	35,06%	18 laporan	14.321.900	100,00%	144,10%		
	8.01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%Aparatur yang disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penangung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5	6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	8.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	83.902.953	100%	83.902.953	100%	87.957.400	-	-	0%	0,00%	100%	83.902.953	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	4.979.100	1 Paket	4.979.100	1 Paket	5.000.000	-	-	0%	0,00%	1 Paket	4.979.100	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	-	-	0%	0,00%	1 Paket	5.000.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 Paket	14.998.800	4 Paket	14.998.800	4 Paket	16.325.000	-	-	0%	0,00%	4 Paket	14.998.800	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 Paket	14.516.000	2 Paket	14.516.000	2 Paket	7.063.400	-	-	0%	0,00%	2 Paket	14.516.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	9 Dokumen	14.702.000	9 Dokumen	14.702.000	9 Dokumen	20.440.000	-	-	0%	0,00%	9 Dokumen	14.702.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Laporan	29.707.053	20 Laporan	29.707.053	20 Laporan	34.129.000	-	-	0%	0,00%	20 Laporan	29.707.053	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	19.970.000	100%	19.970.000	100%	41.576.600	-	-	0%	0,00%	100%	19.970.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibeli	3 Paket	9.970.000	3 Paket	9.970.000	6 Unit	-	-	-	0%	#DIV/0!	3 Paket	9.970.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin kantor yang dibeli	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	5 Unit	41.576.600	-	-	0,00%	0,00%	2 Unit	10.000.000	#VALUE!	100,00%		
	8.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	405.135.148	100%	405.135.148	100%	255.138.000	38,90%	99.241.055	38,90%	38,90%	138,90%	504.376.203	100,00%	124,50%		
	8.01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa perkantoran yang dibayar	12 Laporan	36.127.484	12 Laporan	36.127.484	12 Laporan	49.100.000	3 laporan	7.731.680	25%	15,75%	15 Laporan	43.859.164	100,00%	121,40%		
	8.01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	-	-	0%	0,00%	1 Laporan	4.000.000	100,00%	100,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa perkantoran	12 Laporan	365.007.664	12 Laporan	365.007.664	14 Laporan	202.038.000	4 Laporan	91.509.375	28,57%	45,29%	16 Laporan	456.517.039	#VALUE!	125,07%		
	8.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	119.796.050	100%	119.796.050	100%	124.219.450	5,80%	7.200.000	5,80%	5,80%	105,80%	126.996.050	100,00%	106,01%		
	8.01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Unit	92.650.050	17 Unit	92.650.050	17 Unit	120.049.450	1 unit	7.200.000	5,88%	6,00%	18 Unit	99.850.050	100,00%	107,77%		
	8.01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang di rawat	8 Unit	2.440.000	8 Unit	2.440.000	10 Unit	4.170.000	-	-	0%	0,00%	8 Unit	2.440.000	100,00%	100,00%		
	8.01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	24.706.000	2 Unit	24.706.000	2 Unit	-	-	-	0%	#DIV/0!	2 Unit	24.706.000	150,00%	100,00%		
	8.01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGIPANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Pemuda	121,20%	424.732.700	121,20%	424.732.700	135%	608.515.600	139,77%	2.420.000	103,53%	0,40%	260,97%	427.152.700	215,32%	100,57%		
	8.01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 Dokumen	424.732.700	7 Dokumen	424.732.700	7 Dokumen	608.515.600	0	2.420.000	0,00%	0,40%	7 Dokumen	427.152.700	177,71%	100,57%		
	8.01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan -Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	905 Orang	60.000.000	905 Orang	60.000.000	730 Orang	68.204.800	557 Orang	-	0,00%	0,00%	1462 Orang	60.000.000	105,88%	100,00%		
	8.01	03	2.01	0006	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	100 Keluarga	47.960.000	-	-	0%	0,00%	1 Dokumen	20.000.000	100,00%	100,00%		
	8.01	03	2.02	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang		76 Orang		76 Orang	492.350.800	-	2.420.000	0%	0,49%	76 Orang	2.420.000	100,00%	#DIV/0!		

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(Outcome)</i> / Kegiatan <i>(Output)</i>	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5	6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	172,50%	98.714.276.974	172,50%	98.714.276.974	175%	4.061.944.000	172,50%	8.849.500	98,57%	0,22%	345%	98.723.126.474	100,00%	100,00%		
	8.01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan	3 Dokumen	98.714.276.974	3 Dokumen	98.714.276.974	3 Dokumen	4.061.944.000	-	8.849.500	0,00%	0,22%	3 Dokumen	98.723.126.474	106,25%	100,01%		
	8.01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	640 Orang	98.624.329.494	640 Orang	98.624.329.494	400 Orang	4.036.560.000	-	2.460.000	0%	0,06%	640 Orang	98.626.789.494	100,00%	100,00%		
	8.01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring	162 Laporan	89.947.480	162 Laporan	89.947.480	118 Laporan	25.384.000	3 Laporan	6.389.500	2,54%	25,17%	165 Laporan	96.336.980	158,76%	107,10%		
	8.01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang bertentangan dengan asas pancasila	0%	849.464.200	0%	849.464.200	0%	1.061.480.680	0%	1.211.500	100%	0,11%	0%	850.675.700	100,00%	100,14%		
	8.01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7 Dokumen	849.464.200	7 Dokumen	849.464.200	7 Dokumen	1.061.480.680	0 Dokumen	1.211.500	0%	0,11%	7 Dokumen	850.675.700	100,00%	100,14%		
	8.01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang tersusun	3 Dokumen	40.324.600	3 Dokumen	40.324.600	3 Dokumen	74.083.400	-	1.211.500	0,00%	1,64%	3 Dokumen	41.536.100	240,14%	103,00%		
	8.01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Peserta Rapat Koordinasi terkait Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	109.139.600	1 Dokumen	109.139.600	1 Dokumen	25.000.000	-	Rp0,00	0%	0,00%	1 Dokumen	109.139.600	100,00%	100,00%		

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Ormas, Orpem, LSM yang aktif	23 Orang	720.000.000	23 Orang	720.000.000	20 Orang	962.397.280	-	Rp0,00	0%	0,00%	23 Orang	720.000.000	100,00%	100,00%		
	8.01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	120%	58.150.000	120%	58.150.000	160%	231.283.700	120%	-	75%	0,00%	140%	58.150.000	300,00%	100,00%		
	8.01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6 Dokumen	58.150.000	6 Dokumen	58.150.000	6 Dokumen	231.283.700	-	-	0%	0,00%	6 Dokumen	58.150.000	0,00%	0,00%		
	8.01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	660 Orang	48.170.000	660 Orang	48.170.000	650 Orang	221.970.000	-	-	0,00%	0,00%	660 Orang	48.170.000	128,18%	100,00%		
	8.01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	9.980.000	12 Laporan	9.980.000	12 Laporan	9.313.700	-	-	0,00%	0,00%	12 Laporan	9.980.000	#VALUE!	100,00%		
	8.01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	7.883.729.890	100%	7.883.729.890	100%	2.978.823.000	100%	618.200.000	23,25%	20,75%	200%	8.501.929.890	200,00%	107,84%		
	8.01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Dokumen	7.883.729.890	12 Dokumen	7.883.729.890	12 Dokumen	2.978.823.000	-	618.200.000	0%	20,75%	12 Dokumen	8.501.929.890	100,00%	107,84%		

No	Kode				Urusan/ Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9= 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Negara, Fasilitas	Jumlah Peserta Rapat terkait Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	101.373.060	3 Dokumen	101.373.060	3 Dokumen	17.000.000	2 Dokumen	-	66,67%	0,00%	5 Dokumen	101.373.060	100,00%	100,00%		
	8.01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah peserta rapat koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	3790 Orang	7.401.845.000	3790 Orang	7.401.845.000	3790 Orang	2.488.616.000	-	535.700.000	0%	21,53%	3790 Orang	7.937.545.000	200,00%	107,24%		
	8.01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas	778 Laporan	14.912.530	778 Laporan	14.912.530	654 Laporan	25.000.000	113 Laporan	-	17,28%	0,00%	891 Laporan	14.912.530	100,00%	100,00%		
	8.01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 Dokumen	365.599.300	12 Dokumen	365.599.300	12 Dokumen	448.207.000	2 Dokumen	82.500.000	16,67%	18,41%	14 Dokumen	448.099.300	100,00%	122,57%		

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - c. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - f. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol memiliki 5 (lima) Program Utama dengan 5 (lima) kegiatan, dan 12 (Dua belas) sub kegiatan dan 1 Program Penunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Bakesbangpol Kabupaten Lamongan dengan tiga sasaran dan enam indikator yaitu: Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani, Persentase peningkatan pendidikan politik, Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD, Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur, Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati dan Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana program dan kegiatan tersebut bersumber dari program Nasional serta mengacu pada kaedah-kaedah perencanaan kegiatan.

Program atau kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai keberhasilan tersebut. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan harmoni sosial dan

wawasan kebangsaan serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah personil tim monitoring Bakesbangpol masih kurang;
- b. Belum adanya pendidikan wawasan kebangsaan yang berbasis pembelajaran;
- c. Belum optimalnya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan pengawasan Ormas dan LSM;
- d. Sasaran sosialisasi UU Pemilu yang masih kurang luas;
- e. Belum maksimalnya penegasan dukungan anggaran sukses Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 yang tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 900/5451/Polpum.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas, maka diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangannya. Adapaun upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menambah personil tim monitoring Bakesbangpol;
- b. Mengadakan kegiatan pramuka kebangsaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan;
- c. Meningkatkan pemahaman terkait Regulasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM dan senantiasa berkoordinasi dengan Bakesbang Provinsi terkait mekanisme penerbitan SKT dan pengawasan Ormas/LSM;
- d. Perlunya kerjasama dengan instansi lain dalam sosialisasi Pendidikan Politik untuk memperluas sasaran, seperti KPU dan Parpol;
- e. Mengkoordinasikan dengan BPKAD untuk pengajuan anggaran yang belum teralokasikan dan memprioritaskan kegiatan yang teruang dalam surat Kemendagri Nomor 900/5451/Polpum untuk mensukseskan pemilu tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya

pelaksanaan pembangunan. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi OPD. Adapun Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tribulan I) Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase peningkatan pendidikan politik	-	-	40%	60%	80%	100%	81,25%	172,50%	175,00%	180,00%	
3	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur	-	-		62%			-	73,58%	-	-	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD	-	-		79%			-	82,068%	-	-	
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	-	-		77%			-	73,58%	-	-	
6	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	87,14	87,15	87,16	87,17	89,33	89,59	89,60	89,62	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai wadah dan pelayanan dari lembaga organisasi politik, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya yang terhimpun dalam suatu lembaga yang menanganinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat strategi dan kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan periode tahun 2021-2026 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2021-2026. Dari semua indikator yang ada, realisasi kinerja telah memenuhi target bahkan lebih. Kinerja positif Bakesbangpol Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan realisasi kinerja keuangan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa

permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Lamongan berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial:
 - a. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. Adanya tawuran antara perguruan silat;
 - c. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini
 - d. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
- 2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - d. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - e. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan :
 - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Masih tingginya Angka Golput;
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) adalah sebagai berikut:
 - a. Semakin berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungan Kabupaten Lamongan;
 - b. Rendahnya kualitas politik dan demokrasi di lingkungan Kabupaten Lamongan.

Dari permasalahan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada atau mengubahnya menjadi peluang sebagai berikut:

a. Tantangan

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bakesbangpol dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Globalisasi;
- 2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, munculnya fenomena ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- 3) Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar berdampak signifikan terhadap monitoring dan evaluasi keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat, serta Sasaran sosialisasi UU Pemilu yang masih kurang luas;
- 4) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur;
- 5) Jumlah personil tim monitoring Bakesbangpol masih kurang;
- 6) Kurangnya koordinasi antara instansi;
- 7) Belum adanya pendidikan wawasan kebangsaan yang berbasis pembelajaran;
- 8) Belum optimalnya penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan pengawasan Ormas dan LSM;

b. Peluang

Adapun beberapa faktor pendorong yang menjadi peluang Bakesbangpol dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - 2) Komitmen dan *political will* yang mendukung;
 - 3) Keterbukaan informasi dan berkembangnya Teknologi informasi;
 - 4) Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini konflik sosial.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan untuk program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain:

- a. Membangun persatuan dan kesatuan melalui harmoni sosial dan wawasan kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Harmonisasi sosial menjadi aspek penting dalam membangun persatuan dan kesatuan. Budaya, agama, dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan didalam masyarakat. Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi kerawanan sosial, berkembangnya paham radikalisme/terorisme, SARA, dan mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan. Potensi konflik yang banyak terjadi akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.

- b. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.

Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan kondusif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus mampu mengkoordinasikan situasi dan kondisi daerah agar tetap kondusif, aman dan tertib menjaga suatu pemerintahan yang Demokratis dengan menumbuh kembangkan kehidupan berpolitik sebagai upaya untuk merekatkan kehidupan berbangsa yang transparan serta aktif dan mandiri.

Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan dalam misi 4 yakni **“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram”**, maka sebagai pendukungnya adalah :

1. Menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam Berbangsa dan Bernegara yang demokratis , partisipatif dan harmonis.
2. Menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
3. Meningkatkan kemandirian intuisi-intuisi sosial baik Inpra maupun Supra politik yang berfungsi sebagai perekat persatuan dan Kesatuan Bangsa
4. Menciptakan dan memperkuat situasi politik dan keamanan yang aktif dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan tidak memiliki usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

TABEL 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bakesangpol Kabupaten Lamongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 530.000.000	- Pemuda Panca Marga : 50.000.000 - Yayasan Sosial Mutiata Insani: 50.000.000 - Pemuda Pancasila : 150.000.000 - LBH Mawaddah : 150.000.000 - Teksodama : 75.000.000 - Lamongan Dangdut Community : 55.000.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan mengacu pada agenda pembangunan nasional ke enam yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi. 8 (delapan) Agenda pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan serta Mendorong Kemandirian Bangsa
3. Prioritas Nasional 3 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Prioritas nasional 4 : Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
5. Prioritas nasional 5 : Membangun dari Desa dan dari Bawah
6. Prioritas nasional 6 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
7. Prioritas nasional 7 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Lapangan Kerja Berkualitas
8. Prioritas nasional 8 : Memperkuat Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan, dan Budaya

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran PD Tahun 2025

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilu pada yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (NAWA BHAKTI SATYA) serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Lamongan** : adalah suatu kondisi daerah yang mampu bersaing secara regional maupun nasional, ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter.
- 2) **Berkelanjutan** : adalah menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup serta harmoni sosial. Kabupaten Lamongan berkomitmen membangun sistem pembangunan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, solidaritas, dan toleransi, sehingga masyarakat yang majemuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"** ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Misi 1.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus utama misi ini adalah mendorong hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri olahan, dan pariwisata agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri. Melalui penguatan investasi, pengembangan desa mandiri berbasis potensi lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, misi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat desa.

Misi 2.

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berakhlak Dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada pemenuhan layanan dasar yang merata, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan kompetensi generasi muda, serta penguatan pendidikan karakter, diharapkan terwujud insan-insan Lamongan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

Misi 3.

Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi tiga yakni peningkatan kualitas dan keterpaduan sistem transportasi, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, dan fasilitas publik lainnya yang merata hingga pelosok desa. Di saat yang sama, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Misi 4.

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan., dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus Misi ke empat yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan sosial sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan peran aktif seluruh elemen masyarakat—termasuk perempuan, difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya—didorong untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkeadilan.

Misi 5.

Mewujudkan Reformasi Birokasi Yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan Yang Yang Akuntabel Dan Responsif, dengan penjelasan sebagai berikut:

Fokus misi ke lima adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di tengah tantangan dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan, birokrasi Lamongan diarahkan menjadi lebih integratif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit utama.

Reformasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Tujuan

- “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM”.

Indikator :

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
2. Nilai Toleransi

Sasaran

- Meningkatkan harmonisasi sosial dan wawasan kebangsaan

Indikator :

1. Persentase konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan

- Meningkatkan Kualitas Politik Dan Demokrasi

Indikator :

1. Persentase Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik Masyarakat
2. Presentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD
3. Presentase partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur
4. Presentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati

- Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah

1. Nilai IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 Perubahan Program Dan Kegiatan PD Tahun 2025

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lamongan Tahun 2024 direncanakan ada 6 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dalam Perubahan RENJA. Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Total dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp 111.475.447.933.

Adapun rincian program dan kegiatan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 - 2) Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 - 3) Pembentukan Pkibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1 Renja Perubahan

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai IKM Internal BadanKesatuan Bangsa dan Politik	84,30	3.994.610.744,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai IKM Internal BadanKesatuan Bangsa dan Politik	84,30	3.720.673.687,96	-	273.937.056,04	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi tepat waktu	100%	60.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%Dokumen Perencanaan Kinerja dan Evaluasi tepat waktu	100%	30.000.000,00	-	30.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	13.035.000,00	-	6.965.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kkoordinasi Penyusunan	2 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kkoordinasi Penyusunan	2 Laporan	5.563.600,00	-	14.436.400,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	4 Laporan	20.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	4 Laporan	11.401.400,00	-	8.598.600,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	100%	3.107.152.648,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%Dokumen laporan keuangan yang tepat waktu	100%	3.181.782.237,96	-	74.629.589,96	Penambahan anggaran PPPK	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	19Orang/Bulan	3.067.152.648,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	19Orang/Bulan	3.156.782.237,96	-	89.629.589,96	Penambahan anggaran PPPK	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Laporan	12.500.000,00	-	7.500.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	14 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	14 Laporan	12.500.000,00	-	7.500.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%Aparatur yang disiplin	100%	12.350.000,00	-	-	-	-	-	12.350.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli	38 Paket	12.350.000,00	-	-	-	-	-	12.350.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	120.440.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	87.957.400,00	-	32.482.600,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	-	-	-	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1 Paket	5.000.000,00	-	-	-	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4 Paket	16.325.000,00	-	13.675.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2 Paket	7.063.400,00	-	7.936.600,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	9 Dokumen	20.440.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	9 Dokumen	20.440.000,00	-	-	Bakesangpol Kabupaten Lamongan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Laporan	45.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Laporan	34.129.000,00	-	10.871.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	134.600.096,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	41.576.600,00	-	93.023.496,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibeli	6 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang dibeli	6 Unit	-	-	30.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin kantor yang dibeli	5 Unit	104.600.096,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin kantor yang dibeli	5 Unit	41.576.600,00	-	63.023.496,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	400.188.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%	255.138.000,00	-	145.050.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa perkantoran yang dibayar	12 Laporan	49.100.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa perkantoran yang dibayar	12 Laporan	49.100.000,00	-	-	Bakesangpol Kabupaten Lamongan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Laporan	6.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Laporan	4.000.000,00	-	2.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa perkantoran	14 Laporan	345.088.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa perkantoran	14 Laporan	202.038.000,00	-	143.050.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	159.880.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	100%	124.219.450,00	-	35.660.550,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Unit	152.880.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Unit	120.049.450,00	-	32.830.550,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang di rawat	10 Unit	7.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang di rawat	10 Unit	4.170.000,00	-	2.830.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	-	-	-	Bakesangpol Kabupaten Lamongan	

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Pemuda	92%	1.150.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan dan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan bagi Pemuda	92%	608.515.600,00	- 541.484.400,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 Dokumen	1.150.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 Dokumen	608.515.600,00	- 541.484.400,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan -Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	730 Orang	450.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan -Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	730 Orang	68.204.800,00	- 381.795.200,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	80.000.000,00	Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	47.960.000,00	- 32.040.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	620.000.000,00	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	76 Orang	492.350.800,00	- 127.649.200,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	81%	4.213.525.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	81%	4.061.944.000,00	- 151.581.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen	4.213.525.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Dokumen	4.061.944.000,00	- 151.581.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	400 Orang	4.163.525.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	400 Orang	4.036.560.000,00	- 126.965.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring	118 Laporan	50.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring	118 Laporan	25.384.000,00	- 24.616.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang bertentangan dengan asas Pancasila	0%	1.023.397.280,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas, Orpem dan LSM yang bertentangan dengan asas Pancasila	0%	1.061.480.680,00	38.083.400,00	Penambahan hibah prioritas dan pokir	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7 Dokumen	1.023.397.280,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7 Dokumen	1.061.480.680,00	38.083.400,00	Penambahan hibah prioritas dan pokir	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyusunan Program Kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang tersusun	3 Dokumen	85.000.000,00	Penyusunan Program Kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang tersusun	3 Dokumen	74.083.400,00	- 10.916.600,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Peserta Rapat Koordinasi terkait Bahan Perumusan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1 Dokumen	221.000.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Peserta Rapat Koordinasi terkait Bahan Perumusan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	1 Dokumen	25.000.000,00	- 196.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Ormas, Orpem, LSM yang aktif	20 Orang	717.397.280,00	Pelaksanaan Kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-Jumlah Ormas, Orpem, LSM yang aktif -Jumlah lembaga Ormas, Orpem dan LSM yang menerima bantuan	20 Orang	962.397.280,00	245.000.000,00	Penambahan hibah prioritas dan pokir	Bakesangpol Kabupaten Lamongan

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	78%	280.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	78%	231.283.700,00	-	48.716.300,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6 Dokumen	280.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	6 Dokumen	231.283.700,00	-	48.716.300,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	650 Orang	250.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Peserta Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	650 Orang	221.970.000,00	-	28.030.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	12 Laporan	30.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Jumlah Kecamatan yang dimonitoring -Jumlah Laporan Monitoring Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	12 Laporan	9.313.700,00	-	20.686.300,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	(BERTAMBAH/ BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	2.948.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	2.978.823.000,00	- 289.177.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Dokumen	2.948.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Dokumen	2.978.823.000,00	- 289.177.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Rapat terkait Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	60.000.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Rapat terkait Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	17.000.000,00	- 43.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesbangpol Kabupaten Lamongan

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah -Jumlah peserta BIMTEK Intelijen	3790 Orang	2.388.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah peserta rapat koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah -Jumlah peserta BIMTEK Intelijen	3790 Orang	2.488.616.000,00	100.616.000,00	Sebelumnya anggaran defisiensi menjadi 2.168.616.000 kemudian PAK ditambahkan Hibah Polres berupa Videotron sebesar 320.000.000	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	-Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	654 Laporan	50.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	-Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	654 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 Dokumen	450.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 Dokumen	448.207.000,00	1.793.000,00	Efisiensi Anggaran	Bakesangpol Kabupaten Lamongan
				13.609.533.024,00				12.662.720.667,96			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Perubahan RENJA Bakesbangpol Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bakesbangpol. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Perubahan RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bakesbangpol Kabupaten Lamongan. Perubahan RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bakesbangpol Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Catatan Penting

Dalam pelaksanaan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami keterbatasan dana saat terjadinya Pandemi Covid 19. Anggaran terbatas namun kinerja dituntut lebih intens terutama dalam bidang Kewaspadaan Dini untuk memonitoring wilayah Kabupaten Lamongan secara menyeluruh. Hal ini perlu diperhatikan agar kedepannya Kinerja maksimal didukung dengan anggaran yang maksimal.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bakesbangpol Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan RENJA Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Perubahan RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan RENJA Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Perubahan RENJA Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Juni 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760410 199412 1 002